SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan, Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence*) pada tanggal 5 Agustus 2016 di Jakarta, Indonesia;

c. bahwa . . .

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence*);

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE*).

Pasal 1

(1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence*) yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Agustus 2016 di Jakarta, Indonesia.

(2) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence*) dalam bahasa Indonesia, bahasa Ukraina, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 187

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lydia Silvanna Djaman



REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
KABINET MENTERI UKRAINA
TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina, yang selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak",

Berkeinginan untuk meningkatkan dan memperkuat kerja sama bilateral antara kedua Negara di bidang pertahanan,

Menegaskan bahwa mengembangkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara Para Pihak akan memberikan kontribusi untuk perdamaian dan keamanan internasional dengan cara menciptakan kepercayaan timbal balik, pemahaman dan kerja sama dalam hubungan internasional;

Menyadari bahwa penguatan kerja sama pertahanan akan bermanfaat bagi lembaga-lembaga nasional masing-masing di bidang pertahanan;

Bertujuan untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara kedua negara berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Para Pihak;

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Para Pihak;

Telah menyetujui sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN

Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk memberikan kerangka umum untuk mempromosikan kerja sama bilateral di bidang pertahanan antara Para Pihak di bidang kepentingan bersama, berdasarkan hukum dan peraturan negara Para Pihak, dan prinsip-prinsip saling menghormati, kepercayaan, dan manfaat.

PASAL 2
BIDANG KERJA SAMA

1. Bidang kerja sama Persetujuan ini dapat mencakup:
   a. pertukaran kunjungan dari pejabat tinggi, termasuk Angkatan Bersenjata;
   b. pengembangan kerja sama militer-teknis;
   c. pengembangan kerja sama dalam industri pertahanan dan logistik;
   d. kerja sama dalam pertahanan lingkup ilmiah-teknologi;
   e. pertukaran informasi di bidang pertahanan dan militer;
   f. pengembangan pendidikan dan pelatihan militer;
   g. meningkatkan kerja sama antara Angkatan Bersenjata Negara Pihak;
   h. bidang kerja sama lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

2. Dalam pengembangan kerja sama militer-teknis, serta industri pertahanan dan logistik yang ditentukan dalam huruf "b" dan huruf "c" Paragraf 1 Pasal ini, Para Pihak dapat melakukan kerja sama dalam bidang berikut:
   a. pengadaan persenjataan dan produk militer dalam kerangka proyek umum dan produksi;
   b. persediaan atau persenjataan, peralatan militer dan produk lainnya dari penggunaan militer-teknis;
   c. pemeliharaan, perbaikan dan modernisasi persenjataan, peralatan militer dan memberikan jasa lainnya di bidang militer-teknis;
   d. penjualan lisensi pada produksi persenjataan dan peralatan militer, memberikan dukungan teknis dalam produksi;
   e. penelitian dan pengembangan umum karya-karya di bidang militer-teknis dan saling tukar hasil dari karya tersebut;

f. pertukaran pengalaman dan informasi tentang standardisasi, kodifikasi, kontrol kualitas produk militer dalam rangka memenuhi program bersama kerja sama militer-teknis;

g. mengembangkan program-program yang tepat, penelitian bersama, produksi bersama dan pemasaran bersama peralatan pertahanan melalui antara transfer teknologi.

3. Untuk tujuan pelaksanaan Persetujuan ini, hal-hal yang terkait dengan teknis operasional dan administrasi akan diatur dalam pengaturan tertulis terpisah yang akan disepakati oleh Para Pihak atau otoritas berwenang dari kedua Pihak.

PASAL 3
KERAHASIAAN

1. Perlindungan, penyingkapan, dan transmisi informasi rahasia yang dipertukarkan atau dihasilkan dalam kerangka Persetujuan ini akan dilaksanakan dan dijaga sesuai dengan hukum nasional dan perjanjian internasional yang dibuat oleh Para Pihak.

2. Para Pihak tidak boleh menyingkap, melepas atau mentransfer informasi rahasia atau bahan dalam kerangka Persetujuan ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

PASAL 4
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Para Pihak wajib mencegah penggunaan yang tidak sah dan pengalihan hak kekayaan intelektual ditransfer, ditukar, atau dihasilkan berdasarkan Persetujuan ini sesuai dengan hukum nasional masing-masing dan peraturan negara mereka serta perjanjian internasional yang negaranya merupakan negara pihak.

2. Perlindungan dan distribusi hak kekayaan intelektual termasuk perlindungan hak-hak sah pihak ketiga, serta pertimbangan bagian yang seimbang dari kepemilikan berdasarkan kontribusi dari masing-masing Pihak, akan diatur melalui pengaturan tertulis yang terpisah oleh Para Pihak mengenai bidang khusus dari kerja sama.

PASAL 5
OTORITAS BERWENANG

1. Otoritas berwenang untuk pelaksanaan Persetujuan ini adalah:

   a. untuk Pemerintah Republik Indonesia – Kementerian Pertahanan;

   b. untuk Kabinet Menteri Ukraina – Kementerian Pertahanan.

2. Untuk tujuan pelaksanaan Persetujuan ini, Otoritas berwenang dari Para Pihak dapat mengatur pertemuan rutin setiap saat dianggap perlu untuk memantau dan meninjau pelaksanaan Pasal 2 Persetujuan ini.

PASAL 6
PENGATURAN KEUANGAN

Kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak, setiap Pihak harus menanggung biaya sendiri dalam pelaksanaan Persetujuan ini dan sesuai dengan alokasi anggaran.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul antara Para Pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini akan diselesaikan melalui negosiasi bilateral dan konsultasi antara Para Pihak dan, jika perlu, melalui saluran diplomatik.

PASAL 8
AMANDEMEN

Persetujuan ini dapat diubah atau direvisi berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak dan harus dalam bentuk Protokol terpisah sebagai bagian integral dari Persetujuan ini. Protokol tersebut mulai berlaku pada penerimaan pemberitahuan tertulis terakhir dari pemenuhan prosedur internal yang diperlukan oleh Para Pihak.

PASAL 9

MULAI BERLAKU DAN BERAKHIRNYA

1. Persetujuan ini mulai berlaku pada penerimaan pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran diplomatik setelah pemenuhan persyaratan berdasarkan prosedur internal yang sesuai, yang diperlukan dalam rangka pemberlakuaan Persetujuan ini.
2. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk periode lima tahun berikutnya kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik kepada Pihak lain dalam waktu sedikitnya 90 hari sebelum keinginannya mengakhiri Persetujuan ini.
3. Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan memengaruhi pelaksanaan dari pengaturan, program, dan proyek yang telah disepakati sebelumnya dalam kerangka Persetujuan ini, kecuali disetujui secara tertulis oleh Para Pihak.

Sebagai bukti, yang bertanda tangan di bawah ini yang telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Jakarta pada tanggal Lima bulan Agustus tahun Dua ribu enam belas, dalam dua rangkap asli, dalam bahasa Indonesia, bahasa Ukraina, dan bahasa Inggris, semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan dari dalam penafsiran Perjanjian ini, naskah bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	UNTUK KABINET MENTERI UKRAINA
RYAMIZARD RYACUDU	**PAVLO KLIMKIN**
MENTERI PERTAHANAN	**MENTERI LUAR NEGERI**



REPUBLIK INDONESIA

УГОДА
МІЖ
УРЯДОМ РЕСПУБЛІКИ ІНДОНЕЗІЯ
ТА
КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПРО
СПІВРОБІТНИЦТВО В ОБОРОННІЙ ГАЛУЗІ

Уряд Республіки Індонезія та Кабінет Міністрів України (далі – Сторони);

бажаючи покращити та підсилити двостороннє співробітництво між двома державами в оборонній галузі;

визнаючи, що розвиток дружніх відносин та співробітництво між Сторонами буде внеском до міжнародного миру та безпеки шляхом взаємної довіри, порозуміння та співпраці у міжнародних відносинах;

визнаючи, що розвиток оборонного співробітництва буде корисним для їхніх відповідних державних установ у оборонній галузі;

прагнучи до сприяння співробітництву в оборонній галузі між двома державами, спираючись на принципи рівності, взаємної вигоди та цілковитої поваги суверенітету та територіальної цілісності Сторін;

поважаючи законодавство держав Сторін;

домовилися про таке:

СТАТТЯ 1
МЕТА

Метою цієї Угоди є запровадження загальних принципів для розвитку двостороннього співробітництва в оборонній галузі між Сторонами за напрямами, що становлять спільний інтерес, відповідно до законодавства держав Сторін, принципів взаємної поваги, довіри і вигоди.

СТАТТЯ 2
НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА

1. Напрями співробітництва за цією Угодою можуть включати:
   a. обмін візитами вищих посадових осіб, у тому числі від збройних сил;
   b. розвиток військово-технічного співробітництва;
   c. розвиток співробітництва в галузі оборонної промисловості та логістики;
   d. співробітництво в оборонній науково-технологічній галузі;
   e. обмін інформацією з оборонних та військових питань;
   f. розвиток військової освіти та підготовку персоналу;
   g. сприяння співробітництву між збройними силами держав Сторін;
   h. інші напрями співробітництва за взаємною згодою Сторін.
2. Щодо розвитку співробітництва у військово-технічній галузі, оборонній промисловості та логістиці, як зазначено у підпунктах "b" і "c" пункту 1 цієї статті, Сторони можуть здійснювати співробітництво в таких сферах:
   a. закупівля озброєння та військової продукції в рамках спільних проектів та виробництва;
   b. постачання озброєння, військової техніки та іншої продукції військового призначення;
   c. обслуговування, ремонт і модернізація озброєння, військової техніки та надання інших послуг у військово-технічній галузі;
   d. продаж ліцензій щодо виробництва озброєння та військової техніки, надання технічної підтримки такому виробництву;
   e. спільні дослідження та розробки у військово-технічній галузі, а також взаємний обмін результатами такої діяльності;
   f. обмін досвідом та інформацією щодо стандартизації, кодифікації,

контролю якості військової продукції з метою здійснення спільних програм військово-технічного співробітництва;

g. розробка, у разі необхідності, відповідних програм, проведення спільних наукових досліджень, спільного виробництва та спільного продажу оборонного обладнання шляхом використання інших технологій.

3. З метою виконання цієї Угоди оперативні, адміністративні та технічні питання визначаються окремими письмовими домовленостями, укладеними обома Сторонами або компетентними органами обох Сторін.

СТАТТЯ 3
КОНФЕДЕНЦІЙНІСТЬ

1. Захист, розкриття та передача інформації з обмеженим доступом, обмін якою здійснюється або яка створюється за цією Угодою, буде проводитися та захищатися відповідно до національного законодавства та міжнародних договорів, укладених Сторонами.
2. Сторони не повинні розголошувати, розкривати або передавати будь-яку інформацію з обмеженим доступом або матеріали в рамках цієї Угоди будь-якій третій стороні без попередньої письмової згоди іншої Сторіни.

СТАТТЯ 4
ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

1. Сторони відповідно до законодавства своїх держав, а також міжнародних договорів, учасниками яких є їхні держави, запобігають несанкціонованому використанню та передачі прав інтелектуальної власності, які передано, обміняно та набуто в рамках цієї Угоди.
2. Захист та розповсюдження прав інтелектуальної власності, включаючи захист легітимних прав третьої сторони, а також визначення справедливої долі власності, що базується на внеску відповідних Сторін, мають бути узгоджені Сторонами окремими письмовими домовленостями в конкретних галузях співробітництва.

СТАТТЯ 5
КОМПЕТЕНТНІ ОРГАНИ

1. Компетентними органами для виконання цієї Угоди є:
   a. від Уряду Республіки Індонезія – Міністерство оборони;
   b. від Кабінету Міністрів України – Міністерство оборони.
2. Для виконання цієї Угоди компетентні органи Сторін можуть проводити регулярні зустрічі в будь-який час з метою здійснення моніторингу або перегляду виконання статті 2 цієї Угоди.

СТАТТЯ 6
ФІНАНСОВІ ПИТАННЯ

Якщо Сторони не домовляться про інше, кожна Сторона несе свої власні витрати в процесі виконання положень цієї Угоди відповідно до бюджетних асигнувань.

СТАТТЯ 7
ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Будь-який спір, який виникає між Сторонами щодо тлумачення або застосування положень цієї Угоди, вирішуватиметься шляхом проведення двосторонніх переговорів та консультацій між Сторонами та, в разі необхідності, дипломатичними каналами.

СТАТТЯ 8
ДОПОВНЕННЯ

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть вноситися зміни або доповнення, які оформлюються окремим Протоколом, що складатиме невід'ємну частину цієї Угоди. Такий Протокол набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур.

СТАТТЯ 9
НАБРАННЯ ЧИННОСТІ, СТРОК ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ

1. Ця Угода набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення дипломатичними каналами про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.
2. Ця Угода залишається чинною протягом п'ятирічного періоду і автоматично продовжуватиметься на кожні наступні п'ять років за умови, що одна зі Сторін не повідомить у письмовій формі дипломатичними каналами іншу Сторону щонайменше за 90 днів до завершення відповідного п'ятирічного періоду про свій намір припинити дію цієї Угоди.
3. Припинення дії цієї Угоди не впливатиме на виконання домовленостей, програм та проектів, що були укладені раніше в рамках цієї Угоди, крім випадків, якщо Сторони письмово не домовляться про інше.

На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином уповноважені своїми урядами, підписали цю Угоду.

Учинено в м. Джакарта 5 серпня 2016 року в двох примірниках, кожний індонезійською, українською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення будь-яких розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди перевага надається текстові англійською мовою.

ЗА УРЯД РЕСПУБЛІКИ ІНДОНЕЗІЯ

РІАМІЗАРД РІАКУДУ
Міністр оборони

ЗА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПАВЛО КЛІМКІН
Міністр закордонних справ

REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE
ON
COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE

The Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine, hereinafter referred to as the "Parties",

Desiring to enhance and strengthen the bilateral cooperation between the two states in the field of defence;

Affirming that developing friendly relations and cooperation between the Parties will contribute to international peace and security by means of creating mutual confidence, understanding and cooperation in international relations;

Recognizing that the strengthening of defence cooperation will be beneficial to their respective national institutions in the field of defence;

Aiming to promote cooperation in the field of defence between the two states based on the principles of equality, mutual benefit and full respect of sovereignty and territorial integrity of the Parties;

Pursuant to the prevailing laws and regulations of the Parties' states;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1
OBJECTIVE

The objective of this Agreement is to provide a general framework for promoting bilateral cooperation in the field of defence between the Parties in areas of mutual interest, based on prevailing laws and regulations of the Parties' states, and the principles of mutual respect, trust and benefit.

ARTICLE 2
AREAS OF COOPERATION

1. The areas of cooperation of this Agreement may include:
   a. exchange of the visits of the high ranking officials, including armed forces;
   b. development of military-technical cooperation;
   c. development of cooperation in defence industry and logistics;
   d. cooperation in defence scientific-technologic sphere;
   e. exchange of information on the defence and military matters;
   f. development of military education and training;
   g. promoting of cooperation between the Armed Forces of the Parties states;
   h. other areas of cooperation as mutually agreed by the Parties.

2. In the development of cooperation in military-technical, and defence industry and logistics specified in positions "b" and "c" Paragraph 1 of this Article, the Parties may conduct the cooperation in the following spheres:
   a. acquisition of armament and military products within the frameworks of common projects and production;
   b. supply or armament, military equipment and other products of military-technical use;
   c. maintenance, repairing and modernization of armament, military equipment and rendering other services in the military-technical field;
   d. sale of licenses on production of armament and military equipment, providing technical support in its production;
   e. common research and development works in military-technical field and mutual exchange of the results of such work;

f. exchange of experience and information on standardization, codification, control of quality of military products in order to fulfil joint programs of military-technical cooperation;

g. develop where appropriate programmes, joint research, joint production and joint marketing of defence equipments through among others transfer of technology.

3. For the purpose of the implementation of this Agreement, the operational, administrative and technical matters shall be subject to separate written arrangements to be concluded by both Parties or by the competent authorities of both Parties.

ARTICLE 3
CONFIDENTIALITY

1. The protection, disclosure and transmission of classified information exchanged or generated within the framework of this Agreement will be handled and safeguarded in accordance with the national laws and the international agreements concluded by the Parties.

2. The Parties shall not disclose, release or transfer any classified information or materials within the framework of this Agreement to any third party without prior written consent of the other Party.

ARTICLE 4
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. The Parties shall prevent unauthorized use and transfer of intellectual property rights transferred, exchanged or generated under this Agreement in accordance with respective national laws and regulations of their states as well as the international agreement to which their countries are party to.
2. The protection and distribution of intellectual property rights including protection of a third party's legitimate rights, as well as the consideration of equitable portion of ownership based on the contribution of the respective Parties, shall be arranged through separate written arrangements by the Parties on the specific areas of cooperation.

ARTICLE 5
COMPETENT AUTHORITIES

1. The competent authorities for the implementation of this Agreement are:
   a. for the Government of the Republic of Indonesia – the Ministry of Defence;
   b. for the Cabinet of Ministers of Ukraine – the Ministry of Defence.

2. For the purpose of the implementation of this Agreement, the Competent Authorities of the Parties may organize regular meetings at any time deemed necessary in order to monitor and review the implementation of Article 2 of this Agreement.

ARTICLE 6
FINANCIAL ARRANGEMENTS

Unless decided otherwise by the Parties, each Party shall bear its own expenses in the implementation of this Agreement and in accordance with its budgetary allocations.

ARTICLE 7
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute arising between the Parties on the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled through bilateral negotiations and consultations between the Parties and, if necessary, through diplomatic channels.

ARTICLE 8
AMENDMENT

This Agreement may be amended or revised based on the mutual consent of the Parties and shall form as a separate Protocol as an integral part of this Agreement. Such Protocol shall come into force on the receipt of the last written notification of the fulfilment of necessary internal state procedures by the Parties.

ARTICLE 9
ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force on the receipt of the last written notification through diplomatic channels on accomplishment by the Parties of proper internal state procedures, which are necessary in order of the present Agreement to enter into force.
2. This Agreement shall remain in force for a five-years period and shall automatically be prolonged for the subsequent five-year periods unless it is denounced by either Party by giving written notification through diplomatic channels to the other Party at least 90 days prior to its intention to terminate this Agreement.
3. The termination of this Agreement will not affect the implementation of arrangements, programs and projects concluded earlier in the framework of this Agreement, unless otherwise agreed in writing by the Parties.

In witness whereof, the undersigned being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in Jakarta on the Fifth of August year Two thousand sixteen, in two originals, in Indonesian, Ukrainian, and English languages, all the texts being equally authentic. In case of any divergence in the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA	FOR THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE
RYAMIZARD RYACUDU	PAVLO KLIMKIN
MINISTER OF DEFENCE	MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS